



PERAN DPR DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

**CERAMAH RAMADHAN KETUA DPR RI
DI MASJID ISTIQLAL JAKARTA**

RABU, 25 AGUSTUS 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010**



PERAN DPR DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

**CERAMAH RAMADHAN KETUA DPR RI
DI MASJID ISTIQLAL JAKARTA**

RABU, 25 AGUSTUS 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2010**

PERAN DPR DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Ceramah Ramadhan di Masjid Istiqlal Jakarta
Rabu, 25 Agustus 2010

Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Ketua DPR-RI 2009-2014

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا ليهتدى لو لا أن هدانا الله # أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له # وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله # اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين #

قال الله تعالى في القرآن الكريم

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقَوْنَ

Yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Albaqoroh 2: 183).

Jama'ah Sholat Isya dan Taraweh Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah,

Marilah terlebih dahulu kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang atas izin dan perkenan-Nya kita dapat bersama-sama berada di Masjid Istiqlal ini, untuk melaksanakan sholat taraweh berjamaah dalam keadaan sehat *wal'afiat. Amien.*

Alhamdulillah, saya selaku Ketua DPR bersyukur dapat mengisi agenda Ramadhan, dan lebih bersyukur lagi karena dapat bertemu dengan para jamaah sholat tarawih yang berbahagia ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul: **Peran DPR Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat.**

Dalam menjalankan peran memperjuangkan aspirasi rakyat, seharusnya sebagai umat muslim, kita meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu shidiq, amanah, tabligh, dan fatonah.

Jama'ah Sholat Isya dan Taraweh Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah,

Para pemimpin bangsa telah sepakat membangun bangsa dan negara ini dengan sistem demokrasi yang beradilan, menuju masyarakat yang sejahtera, yang diridhoi Allah Swt. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya **lembaga perwakilan rakyat**, yang terbentuk melalui proses pemilihan yang demokratis. Kemudian lembaga perwakilan itu bekerja atas dasar kepentingan dan aspirasi rakyat yang diwakili.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang para anggotanya dipilih secara langsung berdasarkan suara

terbanyak dalam Pemilu Legislatif. Melalui sistem Pemilu langsung, lebih menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya di setiap tingkatan pemerintahan, dari Pusat hingga Daerah.

Undang-Undang No. 27 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD maupun Tata Tertib DPR-RI mengatur bahwa DPR-RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama DPR, yaitu **fungsi legislasi, anggaran** dan **pengawasan**. Semua fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Namun demikian, perjuangan untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang sangat menonjol yaitu dalam bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan kunjungan kerja atau kunjungan kerja komisi ke daerah pada masa reses.

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan UU dan pelaksanaan APBN. Sebagai wakil rakyat yang amanah, ketiga fungsi yang dimiliki DPR harus senantiasa dilaksanakan dengan kinerja yang optimal, karena anggota Dewan adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia.

Amanah yang diemban DPR untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, sesungguhnya merupakan kewajiban yang tidak boleh diingkari dan bahkan sebaliknya harus terus diperjuangkan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْنِيَّةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ يَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّدًا بَصِيرًا

inna allaaha ya/murukum an tu-adduu al-amaanaati ilaa ahlihaa wa-idzaa hakamtum bayna alnnaasi an tahkumu bial'adli inna allaaha ni'immaa ya'i zhukum bihi inna allaaha kaana samii'an bashiiraan

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (An-Nisa' (4): 58).

Dalam menjalankan amanat rakyat, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan khianat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَخْوِنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخْوِنُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa takhuunuu allaaha waalrasuula watakuunuu amaanaatikum wa-antum ta'lamuuna

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian melakukan khianat (curang) kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengkhianati amanat-amanat di antara kalian, padahal kalian mengetahuinya" (Surat Al-Anfal (8): 27).

Sedangkan di dalam Hadist Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi Shallalhu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Melalui firman Allah dan Hadist Rasul ini, dapat kita simpulkan bahwa faktor penyerahan amanat adalah kepercayaan seseorang diberi amanat, karena ia dipercaya oleh pemberi amanat. Karenanya, ia tidak boleh mengkhianati pemberi amanat. Penerima amanat wajib menunaikan amanat; jika tidak, pada hari kiamat ia akan mendapatkan balasan yang pedih. Amanat itu termasuk tanda iman, dan khianat termasuk tanda munafiq.

Para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT

Saya menyadari bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tuntutan seluruh elemen masyarakat. Tuntutan ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan pasca Orde Baru. Kewenangan DPR menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kewenangan yang besar tersebut terkait dengan fungsi legislasi, maupun kewenangan terkait dengan fungsi pengawasan.

Kewenangan yang lebih besar tentu menimbulkan ekspektasi (konsekwensi balik) bagi konstituen, atau rakyat yang diwakilinya. Mereka berharap agar aspirasi mereka, untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, lebih diperjuangkan dan diwujudkan.

Aktualisasi fungsi keterwakilan salah satunya tercermin dari pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR-RI. Dalam Pembahasan RUU,

memungkinkan diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menerima masukan dari masyarakat. Di dalam forum inilah, keterlibatan masyarakat luas sangat diperlukan demi terpenuhinya aspirasi dan keinginan rakyat. Masyarakat, juga masih diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat-rapat pembahasan RUU yang bersifat terbuka pada Rapat Kerja Komisi atau Panitia Khusus. Sedangkan dalam rangka penyiapan RUU, masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPR.

Jama'ah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah SWT.

Selain melalui pelaksanaan fungsi legislasi, dalam UU No. 27 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan, bahwa kewajiban anggota Dewan adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Aspirasi dan pengaduan masyarakat didengar, ditampung dan ditindaklanjuti, karena anggota DPR harus memberikan **pertanggungjawaban secara moral dan politis** kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPR-RI yang saya pimpin saat ini berusaha untuk menyempurnakan sistem kerja yang lebih baik, termasuk dalam hal pelaksanaan Kunjungan Kerja yang lebih komprehensif agar target, sasaran, termasuk sistem penganggarannya dapat dilakukan dengan tepat

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk itu, selain melalui agenda rapat-rapat di DPR serta kunjungan kerja, Dewan menerima **penyampaian**

aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat. Pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti oleh Komisi-Komisi di DPR yaitu masalah yang disampaikan bersifat **strategis** dan **politik**, masalah yang berkaitan dengan kebijakan Daerah/Pusat, masalah yang mempunyai dampak yang luas, dan masalah yang terkait dengan kewenangan instansi pemerintah.

Diversifikasi penyerapan saluran aspirasi masyarakat ke DPR juga perlu ditambah diantaranya seperti ide saya selaku Ketua DPR, yaitu diadakan **satu hari khusus untuk rakyat**, yang saya usulkan hari itu dinamakan sebagai "Hari Rakyat". Mungkin saja hari tersebut diadakan satu hari pada Masa Sidang di DPR RI . Saya harapkan, satu "Hari Rakyat" tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak masyarakat yang datang langsung ke Gedung DPR RI guna menyerap aspirasi berbagai kalangan.

Saya juga akan membuat sebuah sistem dimana seluruh pemangku kepentingan dapat mengontrol seluruh aspirasi yg masuk dalam bentuk "**RAKYAT MENGADU, DPR MENJAWAB**".

Ide tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa demokrasi pada hakikatnya mengajarkan agar anggota masyarakat, agar dapat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Memenuhi kehendak rakyat atau kehendak umum merupakan esensi dari fungsi anggota lembaga legislatif selaku wakil rakyat. Rakyat berhak menilai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh para anggota Dewan. Namun demikian, penilaian itu hendaknya realistik dan obyektif.

Namun demikian, ide tersebut masih harus dibicarakan dengan Pimpinan Dewan lainnya dan para pimpinan Fraksi di DPR. Sebagaimana

diketahui bahwa setiap bentuk kebijakan atau gagasan-gagasan baru yang belum diatur dalam Tata Tertib DPR, harus mendapatkan persetujuan bersama.

Para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT

Dalam rangka mengembangkan amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, seorang anggota Dewan perlu memiliki kepribadian dan jati diri yang kuat sebagaimana dicontohkan *Baginda Rasullullah SAW* dimana beliau mempunyai empat sifat untuk membangun kepribadian dan jati diri yang kuat, yaitu sifat *Shiddiq* (benar), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (mesyarkan), dan *Fatonah* (cerdas).

Rasullullah SAW mempunyai sifat *Shiddiq* artinya benar atau membenarkan. Untuk itu, setiap anggota Dewan perlu berusaha menjalankan sifat shidiq dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Benar-benar dan dengan penuh kesungguhan menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Amanah berarti dapat dipercaya. *Rasululloh SAW* sendiri sebelum menjadi Rasul, beliau sudah digelari *Al Amin* (Yang Dapat Dipercaya). Dengan demikian, tidak mungkin Rasul bersifat/ bersikap Khianat (curang). Kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR merupakan suatu bentuk kepercayaan yang perlu dijaga dan terus dikembangkan. Apa yang disampaikan masyarakat, tidak hanya ditampung semata, tapi benar-benar ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Sebagaimana *Rasul* yang sungguh-sungguh menjalankan

amanah karena di hari akhir nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya, maka setiap anggota Dewan juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh konstituen yang memilihnya.

Kalau seorang anggota Dewan tidak amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, maka jangan harap pada Pemilu yang akan datang rakyat akan memilihnya.

Tabligh mempunyai arti menyampaikan wahyu kepada umatnya. *Rasul* akan senantiasa menyampaikan wahyu, apapun bahaya/ancaman yang datang kepadanya. Upaya untuk menerima aspirasi masyarakat, tidak hanya terbatas di gedung DPR semata. Pada setiap kunjungan kerja, anggota Dewan sering kali harus mendatangi daerah-daerah perbatasan atau daerah yang kondisi geografinya sangat sulit untuk dijangkau.

Sifat terakhir yang dimiliki oleh *Rasul* adalah *Fathonah* yaitu cerdas, oleh karena itu manusia yang baik budi pekertinya adalah orang yang memiliki sifat cerdas, sehingga otaknya harus dapat menguasai hawa nafsunya. Inilah yang membedakan umat manusia dengan hewan, jika hewan nafsunya menguasai otaknya, sedangkan manusia otaknya yang harus menguasai nafsunya.

Keberadaan seorang wakil rakyat hakikatnya harus senantiasa dapat menyerap dan memberikan solusi atas berbagai aspirasi atau masalah yang terjadi di masyarakat. Berbagai argumentasi yang disampaikan anggota DPR pada saat rapat kerja dengan Pemerintah adalah salah satu gambaran keseriusan DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Setelah melihat uraian yang saya sampaikan di atas, dalam konteks Peran DPR Dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat, rakyat harus senantiasa

aktif agar aspirasi-aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi-aspirasi umat Islam dapat terserap dengan baik untuk kemudian ditindaklanjuti pembahasannya dan diputuskan mana yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia. Aspirasi-aspirasi umat Islam hendaknya bersifat *rahmatan lil alamin*, tidak hanya untuk kesejahteraan umat Islam saja, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Peran para ulama dalam mengarahkan, membimbing dan menyadarkan umat Islam akan hal tersebut adalah sangat membantu DPR RI dalam melakukan pembuatan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT

Selaku ketua DPR-RI, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh anggota dewan untuk senantiasa mengedepankan disiplin dan etika politik yang baik di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan mengimplementasikan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi harkat dan hak asasi setiap manusia serta dalam upaya menerapkan mekanisme "*checks and balances*". Kita tidak dapat menutup mata dengan hadirnya berbagai penilaian masyarakat atas citra dan kinerja DPR yang selama ini belum dianggap memuaskan.

Kami tidak anti-kritik. Kami menyadari bahwa DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, maka Gedung DPR adalah Rumah Rakyat, dimana kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari berbagai kalangan. Kami akan senantiasa berempati pada permasalahan-permasalahan rakyat, dan berupaya memperjuangkannya seoptimal mungkin. Kami mengharapkan kritik-konstruktif dari berbagai elemen

masyarakat, agar kinerja kami sebagai wakil rakyat dapat kami tunaikan secara optimal.

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga kita dapat menjunjung amanah, yakni orang yang mampu meneladani akhlak dan sifat Rasullullah SAW.

والله الموافق الى اقوامطريق

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 25 Agustus 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

Dr. H. MARZUKI ALIE